

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada bidang perekonomian yang maju dapat diindikasikan dari bergerakaknya perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian serta kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus dapat bersaing sehingga perlu dilakukannya suatu perubahan kearah yang lebih baik. Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dilihat dari pembangunan dibidang perekonomian salah satunya sektor jasa keuangan. Oleh karena itu pembiayaan pembangunan sangat membutuhkan keberadaan lembaga keuangan (Firdausy, 2018:15).

Lembaga keuangan merupakan wadah dan perantara kegiatan keuangan. Secara umum lembaga keuangan diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Muljaningsih dan Perdana 2021:1). Lembaga keuangan non bank adalah satu dari dua lembaga keuangan yang ada di Indonesia Dengan adanya peran vital lembaga keuangan non bank terhadap perekonomian nasional, lembaga keuangan non bank ini memiliki beberapa jenis salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Mikro atau LKM (Firdausy, 2018:7).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan non bank dimana kegiatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) turut andil dalam mengambil bagian atas tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, bagi anggota,

nasabah, dan masyarakat (Rachamawati *et al.*, 2019:3). Masyarakat dengan kebutuhannya yang semakin meningkat seiring perkembangan zaman semakin beragam yang membuat manusia dituntut untuk menjadi masyarakat yang lebih giat berusaha dan berwirausaha guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena lapangan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit sementara jumlah penduduk banyak dan selalu meningkat pada lingkungan masyarakat.

Masyarakat dituntut agar dapat berwirausaha secara mandiri namun demikian yang menjadi alasan adalah permodalan memerlukan persyaratan banyak, rumit, adanya agunan serta bunga yang dipungut cukup besar menyebabkan masyarakat enggan untuk meminjam uang di bank untuk mencukupi modal usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang dapat memudahkan masyarakat kecil untuk memperoleh modal bagi usahanya dimana tentunya syarat mudah dijangkau serta bunga yang cukup rendah sehingga masyarakat kecil mudah menjangkaunya. Disamping itu LKM didesa atau kelurahan dengan tujuan memberikan ruang gerak sektor mikro pedesaan dengan membentuk Lembaga Keuangan Mikro dengan nama Koperasi Wanita (Soekarwo, 2016:186).

Koperasi Wanita memiliki peranan yang cukup penting, koperasi ini menunjukkan keberadaan yang bukan hanya menguntungkan pada anggota, koperasi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Koperasi wanita adalah jenis dari koperasi yang bergerak dalam hal perencanaan, organisasi dan manajemen yang bertujuan

meningkatkan pendapatan keluarga dan meningkatkan status sosial (Devanty dan Nyoman, 2017:655).

Fungsi Koperasi Wanita adalah sebagai pemberi pinjaman atau kredit kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami ekonomi lemah. Koperasi Wanita merupakan wadah yang mampu memfasilitasi segala persoalan yang dihadapi perempuan yang dapat dimanfaatkan untuk peluang ekonomi. Dengan demikian para perempuan akan dapat membantu para suami untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dalam hal pemberian kredit, koperasi tidak terlepas dari suatu hambatan atau tantangan. Sering terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan mengalami kemacetan (kredit macet) atau tidak dibayarkan oleh nasabah. Dengan masalah tersebut dapat mengakibatkan permasalahan dan juga kegagalan dalam pemberian kredit. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu nasabah atau anggota dan faktor internal yaitu pihak Koperasi. Kredit adalah kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu kesepakatan akan dibayarkan sesuai dengan tepat waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Semakin besar tingkat pemberian kredit dari keseluruhan pemberian kredit maka akan semakin besar pula jumlah investasi yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

Adapun masalah kredit yang diberikan dan sering terjadi di Koperasi Wanita Parikesit Desa Bandarkedungmulyo dalam tahun belakangan ini, tepatnya pada tahun 2021 yaitu: Pertama, masih ditemukannya antrian pinjaman yang disebabkan kekurangan modal. Kedua, adanya masalah pada anggota yang tidak

mempunyai kesadaran memenuhi angsuran pinjaman tepat waktu (kredit macet) mengakibatkan ketiadaan dana dalam mencairkan pinjaman kepada anggota yang lain. Hal tersebut menjadi suatu penghalang atau masalah yang terjadi di Koperasi Wanita Parikesit Desa Bandarkedungmulyo.

Sistem pengendalian internal berkaitan dengan aktivitas operasi organisasi dan ada dengan alasan bisnis yang mendasar. *Committee of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission (COSO)* menyatakan bahwa pengendalian intern memiliki lima komponen yang berkaitan dengan struktur sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Hayes R. *et al.*, 2017:269).

Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada para anggota di Koperasi, pengendalian internal harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan terlaksananya pengendalian intern yang baik maka akan sangat mempengaruhi organisasi dalam menghindari adanya fraud atau kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan anggota atau koperasi itu sendiri. Pengendalian intern kredit merupakan suatu usaha yang ada untuk menjaga kredit yang akan diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Adapun tujuan inti dari pengendalian intern kredit dalam suatu koperasi adalah untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan tetap aman dan mengetahui apakah kredit yang telah diberikan lancar atau tidak lancar, dan kemudian melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet, mengevaluasi apakah prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan telah baik atau masih perlu disempurnakan, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam

analisis kredit dan mengusahakan supaya kesalahan tersebut tidak terjadi kembali dan meningkatkan moral dan tanggung jawab para karyawan.

Dalam hal pemberian kredit kepada anggota, Koperasi Wanita harus memperhatikan dipatuhinya sistem pengendalian internal dalam pemberian fasilitas kredit sehingga dengan demikian hambatan akan permasalahan kredit yang bermasalah dapat diminimalisir. Adanya kredit bermasalah dapat menghambat kelancaran usaha dari Koperasi Wanita yang mana akan menimbulkan krisis kepercayaan dari anggota atau masyarakat. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang memadai dalam bidang kredit, bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan cara meminimalisir terjadinya suatu penyimpangan, pemborosan, dan kredit macet. Maka dari itu sistem pengendalian internal yang baik akan mencerminkan adanya sikap kehati-hatian dan dalam menjaga kepercayaan dari para anggota atau masyarakat dan dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya.

Penelitian yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal pemberian kredit, diantaranya penelitian (Yahya dan Suwena, 2021) menyatakan sistem pengendalian intern pada BUMDES Tirta Rahayu Desa Yeh Sumbul telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku, masalah yang dihadapi BUMDES Tirta Rahayu dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemberian kredit adalah SDM yang kurang memadai. Kemudian penelitian (Nurwinda dan Jibrail, 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern belum sesuai karena masih ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh manajer dan pejabat pemutus kredit, sistem wewenang terdapat tumpang tindih jabatan,

permohonan kredit tidak bernomor urut, dan tidak ada perputaran jabatan. Penelitian yang dilakukan (Seubelan dan Oematan, 2021) menyatakan bahwa PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Kupang telah melakukan pengendalian internal pada prosedur pemberian kredit investasi dengan baik sesuai dengan lima komponen pengendalian internal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil yang tidak selalu sama dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul yang digunakan peneliti dalam penelitian saat ini adalah **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Berbasis COSO Pada Koperasi Wanita Parikesit Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait di lapangan. Penentuan fokus di dasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan di peroleh dari lapangan yang akan diteliti (Sugiyono 2017:209).

Fokus Penelitian ini terletak pada Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Berbasis COSO Pada Koperasi Wanita Parikesit Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, yang di analisis dengan teori berbasis COSO yang berkaitan dengan 5 komponen pengendalian internal antara lain:

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)
 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen dan kompetensi
 - c. Partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
 - d. Filosofi dan gaya operasi manajemen
 - e. Struktur organisasi
 - f. Pemberian otoritas dan tanggung jawab
 - g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
 - a. Review kinerja
 - b. Pemrosesan informasi dan catatan-catatan transaksi
 - c. Pengendalian fisik
 - d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian adalah “Bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit berbasis COSO pada Koperasi Wanita Parikesit Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit berbasis COSO pada Koperasi Wanita Parikesit Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan, dan peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru tentang bagaimana cara kerja sistem pengendalian internal ini bisa memberi kepercayaan serta keyakinan pada masyarakat dan anggota yang terlibat di Koperasi Wanita Parikesit. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana oleh pembaca khususnya mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang untuk dapat memperoleh informasi mengenai sistem pengendalian internal berbasis COSO pada pemberian kredit, serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran pada pemecahan masalah yang terjadi di Koperasi Wanita Parikesit mengenai sistem pengendalian internal pemberian kredit dan sebagai bahan evaluasi agar masalah tidak terjadi kembali. Serta untuk perkembangan kemajuan kinerja Koperasi Wanita Parikesit.